Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)
Volume 4 No.2, Agustus 2024
ISSN : ISSN : 2775-0752

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. WIRA KUSUMA

Andi Lutfi[1], Faisal [2], Nur Fatwa Basar[3]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Makassar[123]
alutfi13@gmail.com, faisal@gmail.com, nurfatwabasar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Wira Kusuma berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Wira Kusuma telah mmenerapkan sesuai dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan peraturan perpajakan, dengan demikian hipotesis yang diajukan ditolak.

Kata kunci: Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama di Indonesia adalah pajak, disamping sumber gas alam dan minyak bumi iuran pajak dibayarkan karena sangat penting untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk Negara adalah pajak serta digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dalam perpajakan bukan hanya masalah pemerintah melainkan masyarakat juga ikut serta dalam kepentingan dan mengetahui tentang perpajakan.

Berdasarkan fungsinya pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*). fungsi anggaran menjadikan pajak sebagai alat pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional yang meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan pelayanan publik lainnya, sedangkan pengaturan pajak menjadikan salah satu alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. pajak merupakan salah satu alternatif atau sumber penerimaan yang potensial dalam meningkatkan dana dalam negeri, dikarenakan jumlahnya relatif stabil dan juga sebagai cerminan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan.

Terdapat begitu banyak jenis pajak yang dapat menambah pendapatan Negara, di Indonesia sejak 1 april 1985 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dapat kita lihat dari sejarahnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penganti dari pajak penjualan. Setiap nilai tambah barang ataupun jasa yang beredar dari produsen ke konsumen akan di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setiap pergantian masa pemerintahan bahkan di setiap tahun bisa terjadi perubahan kebijakan khususnya di bidang perpajakan pada umumnya. Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh pribadi maupun badan, serta pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran masih belum jelas mekanismenya, sehingga menggunakan presepsi masing-masing Perusahaan.

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran serta pelaporan antara PPN masukan dan PPN keluaran sangat perlu dilakukan sebab masih sering terjadi perbedaan saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Di Indonesia sendiri melaporkan dan menentukan besarnya pajak terutang ke kantor pelayanan pajak, serta menentukan sendiri besaran pajak yang terutang itu disebut dengan "*Self Assesment System"* Adanya fenomena bahwa Penerapan Pajak Pertambahan Nilai diperusahaan yang berada di kota Makassar tidak sepenuhnya berdasarkan Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperulan negara untuk kemakmuran rakyat".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Lebih lanjut menurut Waluyo (2011:2) pajak merupakan iuran (yang dapat dipaksakan) kepada masyarakat yang terutang dan wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mengharapkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan berhubungan dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2018:7) terdapat 3 (tiga jenis pajak yang dapat dikelompokkan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut golongan pajak di bagi menjadi dua bagian yaitu :
   a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau di bebankan kepada orang lain contoh : Pajak Penghasilah (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
   b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
2. Menurut sifat pajak di kelompokkan menjadi dua yaitu :
   a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilah (PPh).
   b. Pajak objektif, yaitu pajak yang tidak melihat kondisi dari wajib pajak, dan hanya mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
   a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut dan kelola langsung oleh pemerintah pusat. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
   b. Pajak daerah yaitu pajak yang berasal dari pajak asli daerah dan dipungut berdasarkan (PERDA) yang digunakan untuk pembangunan pemerintah daerah. Contoh : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kabupaten/kota (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyiapkan, menghasilkan dan memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga memunculkan pertambahan nilai karenanya adanya pemakaian faktor-faktor produksi. Menurut Ebril dkk (2001:3) Fitur utama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut secara luas pada tahap beberapa jalur produksi dan distribusi yang sangat penting dimana pajak masukan dikreditkan terhadap pajak keluaran, dimana setiap penjualan harus di kenakan pajak (pajak keluaran), mereka juga dapat mengklaim kredit (pajak masukan) untuk pajak yang telah mereka kenakan pada pembelian mereka.

Menurut Yusdianto (2002:117) dalam buku Akuntansi perpajakan terapan mengatakan bahwa karena memiliki karakter positif maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Sedangkan menurut Ilyas dan Suhartono (2007:8) berdasarkan buku Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah setiap orang bebas mendefinisikan mengenai PPN karena tidak terdapatnya definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM) di dalam UU PPN. Disamping itu, menurut Soemarso (2013:269) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP dan tarifnya berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbeda namun hakekatnya PPN tetap terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan serta Pajak Keluaran. Menurut Soemarso (2003:270) Pajak Masukan adalah PPN yang dibayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa kena pajak yang sama dalam hal tertentu, Pajak Masukan tidak dapat di kreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang di kenakan atas penjualan barang kena pajak yang di tambahkan sebesar 10 % dari harga jual.

Berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 yaitu :

"Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak".

Dasar hukum PPN adalah UU no. 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini di ubah dengan UU No.11 Tahun 1994, kemudian UU di ubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir di ubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Sebagai pajak tidak langsung, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan langsung pada konsumen tingkat akhir dan dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

a. PPN dipungut oleh PKP penjual pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP. PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut sebagai pajak masukan bagi pembeli.
b. Wajib memungut PPN pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP ke pihak lain, bagi penjual PPN yang di pungut merupakan pajak keluaran
c. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan dalam suatu masa pajak selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.
d. Namun jika jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan dalam suatu masa pajak maka selisihnya menjadi kompensasi ke masa pajak berikutnya, atau restitusi (diminta kembali).
e. Pada setiap masa pajak di lakukan pelaporan dan penghitungan PPN dengan menggunakan surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2009:4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi memiliki beberapa karakteristik yaitu :

1. PPN merupakan Pajak Tidak langsung
   PPN merupakan pajak tidak langsung dan dapat dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis beban. Penangggung pajak merupakan pihak yang memikul beban pajak, akan tetapi tanggung jawab pembayaran pajak dilakukan oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa.
2. PPN merupakan Pajak Objektif
   Akibat timbulnya kewajiaban dalam pembayaran pajak maka kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
3. *Multi-Stage* Tax
   Distribusi dan produksi PPN dikenakan secara bertahap.
4. Non-Komulatif
   Karena adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan maka PPN tidak bersifar kumulatif, dan harga pokok barang atau jasa bukan merupakan unsur PPN yang dibayarkan.
5. *Single* Tarif (Tarif Tunggal)

Tarif yang berlaku di Indonesia hanya menggunakan satu jenis tarif yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor BKP.

6. *Credit Method/ Invoice Method/ Indirect Substruction Method*
   Yaitu hasil dari pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan merupakan pajak yang terutang.
7. Pajak atas konsumsi dalam negeri
   Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
8. *Consumtion Type Value Added Tax*
   Pembelian dan pemeliharaan barang modal Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

Subjek dan Objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang PPN, Kewajiban subjek PPN orang pribadi maupun non-PKP ini diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 16C. jika ditelaah lebih lanjut, subjek PPN, yakni:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:
   1) Pengusaha kena pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang kena pajak (BKP).
   2) Pengusaha kena pajak (PKP) melakukan penyerahan JKP.
   3) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP.
b. Non PKP, dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP, dalam hal:
   1) Impor BKP.
   2) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
   3) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
   4) Melakukan kegiatan membangun sendiri.
c. Pengusaha Kecil Sebagai PKP

Sebagai subjek PPN, sejatinya pengusaha Kecil tidak termasuk dalam kategori PKP, namun jika pengusaha kecil tersebut mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka setelah dikukuhkan, pengusaha kecil menjadi PKP sepenuhnya, PPN dan PPnBM yang terutang menjadi pungutan wajib, dan harus menyetor serta melaporkan pajak.

Pengusaha yang dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil dan tertuang Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut:

1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.
2) Jumlah keseluruhan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya, merupakan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto.
3) Apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP,
4) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar.

Pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan secara otomatis menjadi subjek PPN yang terikat peraturan, wajib memungut, meyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP yang dilakukannya.

2. Objek Pajak Pertambahan Objek Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang baru. Objek Pajak Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dimana Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a. penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

a. Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN. Penyerahan barang dapat di kenakan PPN bila di penuhi unsur :

1) Penyerahan BKP
2) Daerah Pabean
3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
4) Yang melakukan harus PKP

b. PPN dikenakan atas :

1) Penyerahan BKP di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha.
2) Import BKP
3) Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang di lakukan oleh pengusaha.
4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah Pabean.
5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6) Ekspor BKP olek PKP
7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak di gunakan untuk di perjualbelikan, sepanjang PPN yang di bayar pada saat perolehannya dapat di kreditkan.

c. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

Barang Hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya :

a. Minyak Mentah *(Crude oil)*
b. Gas Bumi, Panas bumi.
c. Pasir dan kerikil.
d. Batubara sebelum di olah menjadi briket.
e. Biji besi, biji timah, biji emas, biji nikel, biji tembaga, biji perak, biji bauksit.

Barang-barang kebutuhan pokok yag sangat di butuhkan oleh masyarakat :

a. Beras, gabah
b. Jagung
c. Sagu
d. Kedelai
e. Garam

d. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan, perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, hak tersedia untuk di pakai, termasuk jasa yang di lakukan untuk menghasilkan barang karena atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN berupa permintaan dan pesanan.

PPN dikenakan apabila memenuhi unsur penyerahan jasa :

a. Penyerahan JKP.
b. Daerah pabean.
c. Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan.
d. Yang melakukan PKP.

e. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)
a. Jasa pelayanan kesehatan medis.
b. Jasa di bidang pelayanan sosial.
c. Jasa di bidang pengiriman surat dan perangko.
d. Jasa keuangan.
e. Jasa asuransi.
f. Jasa di bidang keagamaan.
g. Jasa pendidikan.
h. Jasa kesesian dan hiburan yang meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang maka perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dimana yang menjadi DPP yaitu :

1. Harga jual

Merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pungut, faktur pajak dicantumkan dengan potongan harga menurut UU PPN 1984.

2. Penggantian

Yang termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha dalam penyerahan JKP, Ekspor JKP, atau Ekspor BKP tidak berwujud dan Ekspor JKP merupakan Penggantian nilai berupa uang. tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengekspor.

5. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Mentri Keuangan

Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang adalah sebagai berikut :

a. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
b. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
c. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
d. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
e. Atas kegiatan membagung sendiri bangunan permanen dengan luas 300 m2 atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP-nya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
f. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
g. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal dan tarif PPN yang berlaku saat ini yaitu sebesar 10%. Namun demikian mengingat Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menganut Asas *destination principle* dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :

Tarif Pajak Pertambahahan Nilai sebesar 10 % Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan tarif tunggal yang di kenakan terhadap semua jenis BKP/JKP dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggi-tingginya 15% dan serendah-rendahnya 5% yang perubahan tarifnya di atur oleh pemerintah, Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% di kenaikan atas eksport Barang Kena Pajak, bertujuan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk di ekspor sehingga dapat bersaing dipasar luar negeri.

METODE PENELITIAN

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kauntitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode Analisis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun informasi, menyajikan serta menganalisis data kemudian menjelaskan penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Wira Kusuma berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 serta peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diperoleh sebuah gambaran tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kegiatan pada PT. Wira Kusuma yang bergerak dibidang Perdagangan, dimana segala transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT. Wira Kusuma dikenakan perlakuan pajak yang mengacu pada UU No. 42 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Wira Kusuma telah terdaftar sebagai salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) bedasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-27PKP/WPJ.15/KP.0103/2018 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.556.918.3-801.000 yang dikeluaran oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP SULSEL sehingga PT. Wira Kusuma merupakan subjek pajak dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan juga mengkompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta wajib menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma yang terutang disesuaikan pada lokasi dan daerah pabean atau dimana tempat atau perusahaan melakukan kegiatannya.

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut data rekapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma tahun pajak 2019 dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 serta peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 2 : Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma

Masa Pajak 2019	Pajak Keluaran (Rp.)	Pajak Masukan (Rp.)	(-) Kurang/(+) Lebih bayar (Rp.)	Hasil Ekualisasi
Januari	130.119.000	72.931.874	- 57.187.126	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT

Masa Pajak 2019	Pajak Keluaran (Rp.)	Pajak Masukan (Rp.)	(-) Kurang/(+) Lebih bayar (Rp.)	Hasil Ekualisasi
Februari	237.023.021	143.865.664	- 93.157.357	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
Maret	361.483.577	183.517.944	- 177.965.633	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
April	124.627.515	83.660.506	- 40.967.009	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
Mei	108.560.945	58.633.616	- 49.927.329	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
Juni	17.364.874	26.252.736	+ 8.887.862	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
Juli	140.757.965	107.055.282	- 33.702.683	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
Agustus	111.076.571	97.905.796	- 13.170.775	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
September	52.984.340	77.210.184	+ 24.225.844	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
Oktober	64.832.587	64.614.408	- 218.179	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
November	93.728.150	93.626.655	- 101.495	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
Desember	68.028.964	65.544.626	- 2.484.338	Sesuai dengan yang di laporkan di SPT
Total	1.510.587.509	1.074.819.291	435.768.218	

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa PT. Wira Kusuma dalam melakukan perhitungan pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2 dan 4 serta Peraturan Perpajakan yaitu jika dalam suatu Masa Pajak, Pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan harus di bayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila pajak masukan dalam satu masa pajak lebih besar dari pajak keluaran maka selisihnya merupakan pajak lebih bayar yang kemudian dapat di kompensasikan atau direstitusi untuk masa pajak bulan berikutnya. Dapat kita lihat pada bulan Juni terdapat pajak lebih bayar yang di mana kelebihan tersebut di kompensasikan untuk bulan Juli.

2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut data rekapan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma tahun pajak 2019 dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3 : Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma

Masa Pajak 2019	(-) Kurang/ (+) Lebih Bayar	Tanggal Lapor	Keterangan
Januari	- 57.187.126	28 Februari 2019	Sesuai dengan Undang-

			Undang
Februari	- 93.157.357	30 Maret 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
Maret	- 177.965.633	30 April 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
April	- 40.967.009	29 Mei 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
Mei	- 49.927.329	28 Juni 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
Juni	+ 8.887.862	31 Juli 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
Juli	- 33.702.683	30 Agustus 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
Agustus	- 13.170.775	30 September 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
September	+ 24.216.844	29 Oktober 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
Oktober	- 218.179	29 November 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
November	- 101.495	27 Desember 2019	Sesuai dengan Undang-Undang
Desember	- 2.484.338	29 Januari 2020	Sesuai dengan Undang-Undang

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan data tabel 3, Dapat kita lihat pula pada bulan Juni dan September terdapat PPN yang lebih bayar sehingga dalam hal ini perusahaan dapat mengajukan kompensasi pembayaran untuk bulan selanjutnya dengan cara mengkompensasi kelebihan PPN masa pajak bulan berikutnya dimana pajak lebih bayar pada bulan Juni di kompensasikan ke bulan Juli dan untuk pajak lebih bayar pada bulan September di kompensasikan ke bulan Oktober.

PT. Wira Kusuma dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pasal 15A ayat 2 dan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 48 /PMK.03/2020.

3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut data rekapan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma tahun pajak 2019 dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 serta peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4 : Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma.

Masa Pajak 2019	(-) Kurang/ (+) Lebih Bayar	Tanggal Bayar	Keterangan sesuai/tidak dengan UU No. 42 Tahun 2009
Januari	- 57.187.126	27 Februari 2019	Sesuai Undang-Undang
Februari	- 93.157.357	30 Maret 2019	Sesuai Undang-Undang
Maret	- 177.965.633	30 April 2019	Sesuai Undang-Undang
April	- 40.967.009	29 Mei 2019	Sesuai Undang-Undang

Masa Pajak 2019	(-) Kurang/ (+) Lebih Bayar	Tanggal Bayar	Keterangan sesuai/tidak dengan UU No. 42 Tahun 2009
Mei	- 49.927.329	28 Juni 2019	Sesuai Undang-Undang
Juni	+ 8.887.862	31 Juli 2019	Sesuai Undang-Undang
Juli	- 33.702.683	29 Agustus 2019	Sesuai Undang-Undang
Agustus	- 13.170.775	30 Septermber 2019	Sesuai Undang-Undang
September	+ 24.216.844	29 Oktober 2019	Sesuai Undang-Undang
Oktober	- 218.179	29 November 2019	Sesuai Undang-Undang
November	- 101.495	27 Desember 2019	Sesuai Undang-Undang
Desember	- 2.484.338	29 Januari 2020	Sesuai Undang-Undang

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan data tabel 4, dapat dilihat bahwa PT. Wira Kusuma pada bulan januari sampai dengan bulan desember tahun 2019 melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan peraturan Perpajakan yang berlaku tanpa adanya keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana Perusahaan menyetorkan PPN terutang setiap akhir bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 15A ayat 1.

Pembahasan

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Wira Kusuma

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambah nilai (PPN) dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen, dimana PT. Wira Kusama dalam perhitungan PPN menggunakan 2 jenis yaitu :

a. Pajak Keluaran

PPN yang harus dibayarkan perusahaan disebut dengan PPN keluaran maka perusahaan pun melakukan perhitungan berdasarkan peraturan yaitu Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10 %.

Berikut penulis jabarkan rekapan Pajak Keluaran PT. Wira Kusuma pada tahun 2019.

Tabel 6 : Rekapan Pajak Keluaran pada PT. Wira Kusuma

Pajak Keluaran			
Masa Pajak 2019	Total Penjualan (Rp.)	Penjualan SPT	
		DPP (Rp.)	PPN (Rp.)
Januari	1.301.190.001	1.301.190.001	130.119.000
Februari	2.370.230.228	2.370.230.228	237.023.021

Pajak Keluaran			
Masa Pajak 2019	Total Penjualan (Rp.)	Penjualan SPT	
		DPP (Rp.)	PPN (Rp.)
Maret	3.614.835.754	3.614.835.754	361.483.577
April	1.246.275.145	1.246.275.145	124.627.515
Mei	1.085.609.450	1.085.609.450	108.560.945
Juni	173.648.731	173.648.731	17.364.874
Juli	1.407.579.635	1.407.579.635	140.757.965
Agustus	1.110.765.723	1.110.765.723	111.076.571
September	529.843.419	529.843.419	52.984.340
Oktober	648.325.873	648.325.873	64.832.587
November	937.281.500	937.281.500	93.728.150
Desember	680.289.636	680.289.636	68.028.964
Total	15.105.875.096	15.105.875.095	1.510.587.509

Sumber : Data Diolah (2021)

Dari tabel 6, dapat kita lihat bahwa setiap transaksi yang di lakukan perusahaan di kenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenan pajak (DPP) kepada konsumen adalah sebesar Rp. 15.105.875.095,- dan di peroleh pajak keluaran sebesar Rp. 1.510.587.509,-

b. Pajak Masukan

Pajak masukan merupakan pajak yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan transaksi pembelian barang atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP). PPN masukan juga di bedakan menjadi dua bagian yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan mulai diakui dan di hitung ketika faktur pembelian di terima oleh bagian keuangan kemudian dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan pembelian yang diajukan oleh purchasing pada saat melakukan pembelian.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut perusahaan atau yang disebut dengan PPN Masukan maka perusahaan pun melakukan perhitungan berdasarkan peraturan yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10 %. Dibawah ini penulis jabarkan beberapa transaksi pajak Masukan PT. Wira Kusuma pada tahun 2019 :

Tabel 7 : Rekapan Pajak Masukan pada PT. Wira Kusuma.

Pajak Masukan		
Masa Pajak 2019	Penjualan SPT	
	DPP (Rp.)	PPN (Rp.)
Januari	729.318.740	72.931.874
Februari	1.438.656.640	143.865.664
Maret	1.835.179.440	183.517.944
April	836.605.060	83.660.506
Mei	586.336.160	58.633.616
Juni	262.527.360	26.252.736
Juli	1.070.552.820	107.055.282
Agustus	979.057.960	97.905.796
September	772.011.840	77.201.184
Oktober	646.144.080	64.614.408
November	936.266.550	93.626.655
Desember	655.446.260	65.544.626
Total	10.748.102.910	1.074.810.291

Sumber : Data diolah (2021)

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa pajak masukan dibayarkan oleh perusahaan ketika melakukan sebuah transaksi baik pembelian Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) kepada supplier dan dikenakan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. total DPP sebesar Rp. 10.748.102.910,- dan diperoleh pajak masukan sebesar Rp. 1.074.810.291,-

Berdasarkan dari hasil perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh PT. Wira Kusuma dapat diketahui bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran dan Masukan untuk tiap masa pajak yang dilakukan oleh PT. Wira Kusuma sudah benar dan telah sesuai sebagaimana di maksud dalam

pasal 7 ayat 1 dan pasal 8A ayat 1 dalam undang-undang No.42 Tahun 2009 serta Peraturan Mentri Kuangan Nomor 48 /PMK.03/2020.

2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *Self Assesment System* yang dimana perhitungan, penyetoran, pelaporan serta tanggung jawab dilakukan sendiri oleh wajib pajak. maka dalam hal pelaporan atas seluruh kegiatan usaha yang di lakukan dalam hal pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai di laporkan sendiri oleh PT. Wira Kusuma, dimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) lengkap dengan lampirannya sebagai pertanggung jawaban atas pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran perusahaan baik lebih maupun kurang bayar.

PT. Wira Kusuma melakukan pelaporan setiap kegiatan Barang Kena Pajak (BKP), sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dan melampirkan bukti pembayaran atau Bukti Penerimaan Negara (BPN), dalam BPN tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB), setelah masa pajak PT. Wira Kusuma Melampirkan bukti pembayaran yang telah dicopi sebanyak 2 rangkap, yaitu sebagai berikut :

a. Lembar ke 1 : Untuk arsip PT. Wira Kusuma yang akan dilampirkan pada saat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.
b. Lembar ke 2 : Untuk arsip kantor penerimaan pembayaran.

Berikut penulis jabarkan tanggal Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Wira Kusuma pada tahun 2019

Tabel 8 : Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma.

SPT MASA		
Masa Pajak 2019	**(-) Kurang/(+) Lebih Bayar**	**Tanggal Lapor**
Januari	- 57.187.126	28 Februari 2019
Februari	- 93.157.357	30 Maret 2019
Maret	- 177.965.633	30 April 2019
April	- 40.967.009	29 Mei 2019
Mei	- 49.927.329	28 Juni 2019
Juni	+ 8.887.862	31 Juli 2019
Juli	- 33.702.683	30 Agustus 2019
Agustus	- 13.170.775	30 September 2019
September	+ 24.216.844	29 Oktober 2019
Oktober	- 218.179	29 November 2019
November	- 101.495	27 Desember 2019
Desember	- 2.484.338	29 Januari 2020

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan data diatas pada tabel 8, dapat dilihat bahwa pada bulan januari sampai dengan bulan desember 2019 PT. Wira Kusuma dapat melakukan pelaporan pajak sebelum akhir bulan atau akhir masa pajak sudah benar dan telah sesuai sebagaimana di maksud dalam dalam pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No 42 Tahun 2009 serta Peraturan Mentri Kuangan Nomor 48 /PMK.03/2020, namun dapat kita lihat pula tanggal setor pada bulan februari berbeda dengan tanggal pelaporan, berdasarkan wawancara kendala ini terjadi karena sudah hampirnya berakhir jam operasional kantor pada PT. Wira Kusuma sehingga karyawan yang berwenang pada bagian pajak melakukan inisiatif pelaporannya dilakukan keesokan harinya saja, serta dapat kita lihat pula untuk bulan Juni dan September terdapat pajak lebih bayar sehingga perusahaan mengajukan kompensasi pembayaran untuk bulan selanjutnya dengan cara mengkompensasi pajak lebih bayar ke masa pajak bulan berikutnya, dimana kelebihan bayar untuk bulan Juni di kompensasikan ke bulan Juli dan kelebihan bayar untuk bulan September di kompensasikan ke bulan Oktober.

3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan undang-undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagai mana di maksud dalam pasal 9 ayat 3 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.

PT. Wira Kusuma sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib pajak atau perusahaan, mempunyai kewajiban dalam hal melakukan penyetoran besaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kurang bayar dan/atau lebih bayar yang di setorkan ke kas Negara, untuk pajak lebih bayar bisa dikompensasikan atau direstitusi ke masa pajak bulan berikutnya, Sebelum melakukan pembayaran PT. Wira Kusuma terlebih dahulu meminta bukti potong sebagai pelengkap pada saat melaporkan pajak pertambahan nilai, bukti potong kemudian di selisihkan dengan pajak pertambahan nilai yang di pungut oleh perusahaan.

Penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) yang kurang bayar dengan menggunakan giro dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang berbentuk elektronik (E-billing) yang di setorkan ke kas Negara melalui bank ataupun kantor pos, dan setelah wajib pajak menyetorkan maka akan diberikan bukti pembayaran dari pihak bank maupun kantor pos serta dapat pula dilakukan langsung secara elektronik langsung ke kas Negara. Surat Setoran Pajak (SSP) / e-billing terdiri dari 2 rangkap yaitu:

b. Lembar ke 1 : Untuk arsip PT. Wira Kusuma yang akan di lampirkan pada saat pelaporan masa pajak pertambahan nilai.
c. Lembar ke 2 : Untuk Arsip kantor penerimaan pembayaran.

Dibawah ini penulis jabarkan mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di lakukan PT. Wira Kusuma untuk masa Pajak Periode 2019. Apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 9 : Peyetoran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Wira Kusuma.

SPT MASA		
Masa Pajak	**(-) Kurang/ (+) Lebih Bayar**	**Tanggal Setor**
Januari	- 57.187.126	27 Februari 2019
Februari	- 93.157.357	30 Maret 2019
Maret	- 177.965.633	30 April 2019
April	- 40.967.009	29 Mei 2019
Mei	- 49.927.329	28 Juni 2019
Juni	+ 8.887.862	31 Juli 2019
Juli	- 33.702.683	29 Agustus 2019
Agustus	- 13.170.775	30 September 2019
September	+ 24.216.844	29 Oktober 2019
Oktober	- 218.179	29 November 2019
November	- 101.495	27 Desember 2019
Desember	- 2.484.338	29 Januari 2020

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan data pada tabel 9 diatas, dapat dilihat bahwa pada bulan januari sampai dengan bulan desember 2019 PT. Wira Kusuma dapat melakukan pembayaran pajak sebelum akhir bulan atau akhir masa pajak bulan berikutnya sudah benar telah sesuai sebagaimana di maksud dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat 1 serta Peraturan Mentri Kuangan Nomor 48 /PMK.03/2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah telah dilakukan di PT. Wira Kusuma, maka dapat disimpulankan bahwa Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Wira Kusuma berdasarkan perhitungan, perlaporan, dan penyetorannya yang diterapkan telah sesuai dengan penerapan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 42 tahun 2009 dan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Y. 2019. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Bintang Jasa Perkasa. STIE Tri Dharma Nusantara Makassar.

Daud A., Sabijono H., dan Pangerapan S. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada*

PT. Nenggapratama Internusantara. Jurnal EMBA, Vol 1 No. 3 Juni 2013, Hal. 140-149

Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Pajak Pertambahan Nilai,* Jakarta.

Dumais, D, P dan Elim, E. 2015. *Analisisi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Alva Perkasa Manado.* Jurnal EMBA, Vol 3 No. 2 Juni 2015, Hal. 949-957.

Ebrill, Liam dkk. 2001. Modern VAT, Washington DC: IMF, 2001.

Ilyas, W dan Suhartono, R. 2007. *Pajak Pertambaha Nilai dan Penjualan Barang Mewah.* Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi.* Penerbit Andi, Yogyakarta.

Online Pajak 2018. *Klasifikasi dan Kewajiban Subjek PPN*. (https://www.online-pajak.com/subjek-ppn).

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 48 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjuakan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Pohan, C. A. 2016. Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Penerbit Gramedia, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang Undang No. 42 Tahun Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Soemarso, S.R. 2013. *Akuntansi Suatu Pengantar Mewah.* Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia.* Penerbit PT.Index, Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Yusdianto. 2002. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Penerbit Grasindo, Jakarta.